



## Penerapan Teknologi Informasi untuk Mendorong Kemandirian Desa di Era Digital

Muhammad Ridho

Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Asahan

Korespondensi Penulis: [aprimuhammad171@gmail.com](mailto:aprimuhammad171@gmail.com)

**Abstract.** Village independence is one of the priorities in national development, especially in improving the welfare of rural communities. Information technology (IT) has an important role in speeding up this process, especially in the current digital era. This research aims to implement the application of information technology to encourage village independence, both in economic, administrative and social aspects. The method used is a case study in Village X, with a qualitative approach through interviews, observation and documentation analysis. The research results show that the application of IT, such as village information systems, local e-commerce, and web-based administration applications, is able to increase the efficiency of public services, expand market access for village products, and increase participation in village development communities. Thus, the correct application of IT can be an important pillar in realizing independent villages in the digital era.

**Keywords:** information technology, village independence, digital era, e-commerce, public services

**Abstrak.** Kemandirian desa merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Teknologi informasi (TI) memiliki peran penting dalam mempercepat proses tersebut, khususnya di era digital saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan penerapan teknologi informasi dalam mendorong kemandirian desa, baik dalam aspek ekonomi, administrasi, maupun sosial. Metode yang digunakan adalah studi kasus di Desa X, dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan TI, seperti sistem informasi desa, e-commerce lokal, dan aplikasi administrasi berbasis web, mampu meningkatkan efisiensi pelayanan publik, memperluas akses pasar bagi produk desa, serta meningkatkan partisipasi dalam masyarakat pembangunan desa. Dengan demikian, penerapan TI secara tepat dapat menjadi pilar penting dalam mewujudkan desa mandiri di era digital.

**Kata kunci :** teknologi informasi, kemandirian desa, era digital, e-commerce, pelayanan publik

### 1. PENDAHULUAN

Kemandirian desa menjadi salah satu fokus utama pembangunan Indonesia dalam menghadapi era digital dan globalisasi. Desa yang mandiri tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah, tetapi mampu memanfaatkan potensi lokal secara optimal, baik dari segi sumber daya manusia, ekonomi, maupun teknologi. Teknologi informasi menjadi salah satu alat penting yang dapat membantu desa dalam mencapai kemandirian tersebut, baik melalui pengelolaan administrasi yang lebih efisien, promosi produk lokal melalui e-commerce, hingga keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan berbasis data.

Kemampuan desa dalam mengelola pemerintahan, melaksanakan program, membina masyarakat, dan memberdayakan penduduk perlu didukung oleh semua elemen serta sumber daya desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa yang mampu mengelola pembangunan secara mandiri tidak hanya dapat memanfaatkan seluruh aset dan sumber daya

yang dimilikinya, tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan dasar warganya, meningkatkan taraf hidup, memperjuangkan hak-hak warga, serta menata kehidupan yang berkelanjutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembangunan desa merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa secara optimal. Undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa pembangunan desa meliputi empat aspek utama, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kehidupan masyarakat desa, serta pemberdayaan. Salah satu sumber daya yang bisa dimanfaatkan oleh desa adalah penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan manusia yang terus berkembang. TIK tidak hanya mampu meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga membantu dalam pengolahan data yang bermanfaat untuk perencanaan pembangunan, mendukung pengambilan keputusan, serta memberikan berbagai manfaat lainnya.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang pesat di era digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di wilayah pedesaan. Teknologi tidak hanya terbatas pada kawasan perkotaan, tetapi juga mulai diterapkan di desa-desa untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara mandiri. Dalam upaya tersebut, pemanfaatan informasi teknologi menjadi salah satu faktor kunci yang dapat mendorong kemandirian desa.

Desa yang mandiri tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar warganya, tetapi juga memiliki kapasitas untuk mengelola potensi lokal secara optimal. Melalui pemanfaatan TIK, desa dapat meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik, mempermudah akses informasi, serta memperluas pasar untuk produk lokal. Penerapan informasi teknologi memungkinkan desa untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, menciptakan inovasi, dan berkontribusi dalam negeri. Penerapan informasi teknologi di desa mencakup berbagai bidang, mulai dari administrasi pemerintahan desa, manajemen sumber daya, hingga pengembangan ekonomi lokal melalui e-commerce dan platform digital lainnya. Dengan memanfaatkan teknologi, desa dapat mengoptimalkan aset dan potensi lokal, memperbaiki sistem pelayanan, serta memperluas akses informasi bagi masyarakat. Hal ini tidak hanya membantu meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan desa, tetapi juga membuka peluang baru bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi secara berkelanjutan.

Meskipun penerapan informasi teknologi menawarkan berbagai keuntungan, tantangan tetap ada, terutama terkait infrastruktur teknologi dan literasi digital di kalangan masyarakat desa. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif dalam penerapan teknologi informasi yang melibatkan semua pihak, mulai dari pemerintah, pemangku kepentingan, hingga masyarakat desa itu sendiri.

## **2. METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara, Metode ini dipilih karena para informan dianggap mampu menyediakan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini (Karim et al., 2021). teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Ismail dkk, 2022).

## **3. PEMBAHASAN**

Penerapan teknologi informasi (TI) di desa-desa saat ini menjadi salah satu langkah strategi untuk mendorong kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di era digital yang ditandai dengan akses informasi yang cepat dan luas, desa memiliki peluang untuk mengoptimalkan potensi yang ada melalui TI. Pembahasan ini akan menguraikan berbagai aspek penerapan TI dalam mendorong kemandirian desa, meliputi:

### **Peningkatan Akses Informasi**

Penerapan TI memungkinkan masyarakat desa untuk mengakses informasi yang lebih luas dan cepat. Dengan adanya akses internet, warga desa dapat memperoleh informasi tentang pasar, teknologi pertanian terbaru, kesehatan, pendidikan, dan banyak hal lainnya. Misalnya, program penyuluhan pertanian berbasis aplikasi dapat memberikan informasi kepada petani tentang teknik budidaya yang lebih efisien, harga pasar, serta prakiraan cuaca. Hal ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik di tingkat masyarakat.

Peningkatan akses informasi di desa merupakan salah satu aspek penting dalam mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya teknologi informasi, masyarakat desa dapat menjangkau berbagai sumber informasi yang sebelumnya sulit diakses. Berikut adalah beberapa poin penting terkait informasi peningkatan akses:

**a. Akses Informasi Melalui Internet**

Internet menjadi sumber informasi yang tidak terbatas, menawarkan berbagai data dan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat desa. Penggunaan perangkat seperti smartphone dan komputer memungkinkan warga desa untuk mengakses berita, tutorial, dan informasi lainnya dari berbagai sumber. Dengan adanya jaringan internet, petani, pengrajin, dan pelaku UMKM bisa mendapatkan informasi tentang harga pasar, teknik pertanian modern, dan tren konsumen yang dapat meningkatkan daya saing produk mereka.

**b. Platform Digital untuk Penyuluhan dan Pendidikan**

Penerapan platform digital seperti website, aplikasi, dan media sosial juga membuka peluang bagi penyuluhan dan pendidikan jarak jauh. Misalnya, lembaga pemerintahan dan organisasi non-pemerintah dapat menggunakan aplikasi untuk memberikan pelatihan, webinar, atau informasi tentang program-program pemerintah yang dapat diakses oleh masyarakat desa. Ini membantu dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, khususnya dalam bidang pertanian, kesehatan, dan kewirausahaan.

**c. Transparansi dan Akuntabilitas**

Peningkatan akses informasi juga berkontribusi pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan desa. Dengan adanya sistem informasi desa yang transparan, masyarakat dapat memadukan penggunaan anggaran, perkembangan proyek pembangunan, dan pelayanan publik lainnya. Akses informasi ini memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mengawasi dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

**d. Pemanfaatan Media Sosial**

Media sosial berperan penting dalam meningkatkan akses informasi di kalangan masyarakat desa. Melalui platform seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram, warga dapat saling berbagi informasi, pengalaman, dan pengetahuan. Ini tidak hanya meningkatkan keterhubungan antarwarga, tetapi juga memperkuat jaringan sosial dan kolaborasi di antara mereka. Misalnya, petani dapat berbagi tips pertanian, atau pengrajin dapat mempromosikan produk mereka secara lebih efektif.

**e. Tantangan dalam Peningkatan Akses Informasi**

Meskipun ada banyak manfaat dari peningkatan akses informasi, masih ada tantangan yang harus dihadapi. Beberapa desa masih mengalami keterbatasan dalam hal infrastruktur internet, seperti jaringan yang tidak stabil atau tidak adanya akses yang sama sekali di beberapa daerah terpencil. Selain itu, tingkat literasi digital yang rendah di kalangan sebagian masyarakat dapat menghambat pemanfaatan informasi yang tersedia secara maksimal. Oleh

karena itu, perlu adanya program pelatihan dan peningkatan infrastruktur untuk memastikan semua anggota masyarakat dapat memanfaatkan akses informasi ini.

### **Dukungan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

Informasi teknologi juga memberikan dukungan signifikan bagi pengembangan UMKM di desa. Dengan memanfaatkan platform e-commerce, pelaku usaha kecil dapat memasarkan produk mereka ke pasar yang lebih luas tanpa harus bergantung pada tengkulak. Misalnya, petani dan pengrajin lokal dapat menggunakan media sosial atau aplikasi jual beli untuk menjangkau konsumen di luar wilayah mereka. Hal ini berpotensi meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja baru di desa.

Dukungan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan langkah penting dalam memperkuat ekonomi lokal dan nasional, karena UMKM memiliki peran besar dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Agar UMKM dapat berkembang secara optimal, berbagai bentuk dukungan diperlukan, baik dari pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat.

Pertama, akses terhadap pembiayaan menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung UMKM. Banyak UMKM yang kesulitan untuk mendapatkan modal usaha karena keterbatasan akses ke lembaga keuangan formal. Oleh karena itu, dukungan pembiayaan yang terjangkau sangat penting, seperti program kredit dengan bunga rendah, pinjaman tanpa agunan, dan pembiayaan berbasis syariah yang lebih fleksibel. Selain itu, adanya program penjaminan kredit dari pemerintah membantu mengurangi risiko bagi lembaga keuangan dalam memberikan pinjaman kepada UMKM.

Di samping itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi aspek penting lainnya. UMKM membutuhkan pelatihan yang berkelanjutan dalam berbagai aspek, seperti manajemen bisnis, pemasaran digital, pengelolaan keuangan, hingga keterampilan khusus terkait produk yang dihasilkan. Pemerintah maupun organisasi non-pemerintah dapat berperan besar dalam menyediakan pelatihan ini secara gratis atau dengan biaya yang terjangkau, agar UMKM dapat meningkatkan efisiensi dan daya saingnya di pasar.

Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi juga merupakan dukungan krusial bagi UMKM. Di era digital, UMKM yang mampu beradaptasi dengan teknologi memiliki peluang lebih besar untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan bersaing secara lebih efektif. Dukungan ini dapat berupa program pelatihan digital, penyediaan infrastruktur teknologi, hingga bantuan untuk masuk ke platform e-commerce. Dengan digitalisasi, UMKM dapat menjangkau konsumen di luar wilayah lokal, bahkan hingga tingkat internasional.

Selanjutnya, kebijakan dan regulasi yang mendukung UMKM menjadi aspek yang tidak kalah penting. Regulasi yang sederhana, mudah dipahami, dan tidak memberatkan pelaku UMKM akan mendorong pertumbuhan usaha kecil. Pemerintah dapat berperan dengan memudahkan proses perizinan, mengurangi beban pajak, serta memberikan insentif kepada UMKM yang mampu berinovasi atau menciptakan lapangan kerja. Kebijakan yang mendukung juga perlu memperhatikan perlindungan bagi UMKM dalam menghadapi persaingan dengan perusahaan besar.

Dukungan untuk UMKM juga memerlukan promosi produk lokal agar UMKM dapat lebih dikenal oleh masyarakat. Kampanye “Cinta Produk Lokal” atau program kolaborasi dengan sektor swasta dapat membantu meningkatkan permintaan terhadap produk-produk UMKM. Selain itu, partisipasi dalam pameran atau pasar UMKM juga membuka peluang jaringan pemasaran yang lebih luas dan memperkenalkan produk UMKM kepada calon pembeli dan investor potensial.

### **Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan**

Penerapan TI dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa. Dengan adanya platform digital, masyarakat bisa lebih mudah terlibat dalam forum diskusi, survei, atau aplikasi pengaduan untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan mereka. Hal ini mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, sehingga pembangunan yang dilakukan lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan warga.

### **Tantangan dalam Penerapan TI**

Meskipun penerapan TI memberikan banyak manfaat, ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Pertama, masalah infrastruktur, seperti akses internet yang belum merata, masih menjadi kendala di banyak desa. Kedua, rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat desa dapat menghambat pemanfaatan TI secara optimal. Oleh karena itu, pelatihan dan pendidikan mengenai penggunaan TI sangat penting untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi.

Penerapan Teknologi Informasi (TI) dalam organisasi dan bisnis membawa banyak manfaat, tetapi juga diiringi berbagai tantangan yang perlu diatasi agar teknologi dapat digunakan secara optimal dan berkelanjutan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan anggaran, terutama bagi perusahaan kecil atau sektor pemerintahan yang memiliki alokasi dana terbatas. Implementasi TI sering kali membutuhkan biaya besar, baik dalam hal perangkat keras, perangkat lunak, maupun sumber daya manusia yang kompeten. Selain itu, biaya perawatan dan pembaruan sistem TI secara berkala juga perlu diperhitungkan agar sistem tetap up-to-date.

Tantangan berikutnya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang terampil. Tidak semua organisasi memiliki staf yang memiliki kemampuan teknis yang cukup untuk mengoperasikan atau mengelola sistem TI yang kompleks. Keterbatasan ini sering kali memicu ketergantungan pada pihak ketiga, yang mungkin tidak selalu sesuai dengan kebutuhan atau anggaran organisasi. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi karyawan menjadi aspek penting, namun juga membutuhkan waktu dan biaya tambahan.

Keamanan data juga menjadi tantangan serius dalam penerapan TI, terutama dengan meningkatnya ancaman siber, seperti peretasan, malware, dan pencurian data. Organisasi harus memastikan bahwa sistem TI mereka dilengkapi dengan perlindungan keamanan yang memadai untuk melindungi data sensitif dari risiko tersebut. Proses ini memerlukan investasi dalam perangkat keamanan dan tenaga ahli yang berpengalaman dalam mengelola risiko keamanan siber, serta pemahaman seluruh karyawan tentang pentingnya menjaga kerahasiaan data.

Selain itu, resistensi atau penolakan terhadap perubahan teknologi masih kerap terjadi, terutama di lingkungan yang terbiasa dengan metode kerja tradisional. Banyak karyawan yang merasa terbebani dengan keharusan untuk belajar dan beradaptasi dengan teknologi baru, sehingga menimbulkan resistensi yang memperlambat proses adopsi teknologi. Penolakan ini bisa disebabkan oleh ketakutan akan perubahan atau kurangnya pemahaman tentang manfaat teknologi. Untuk mengatasi tantangan ini, dibutuhkan strategi perubahan budaya organisasi dan sosialisasi yang efektif tentang pentingnya penerapan TI.

Keselarasannya antara teknologi dan kebutuhan bisnis juga sering kali menjadi hambatan. Tidak jarang teknologi yang diimplementasikan tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan operasional atau strategi organisasi, yang menyebabkan kurang optimalnya pemanfaatan teknologi tersebut. Agar teknologi benar-benar memberikan nilai tambah, penting bagi organisasi untuk terlebih dahulu memahami kebutuhan bisnisnya sebelum memilih solusi TI yang akan digunakan.

Dengan menghadapi dan mengatasi tantangan-tantangan ini secara tepat, penerapan TI dapat menjadi lebih lancar dan memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kinerja dan daya saing organisasi.

#### **4. KESIMPULAN**

Penerapan informasi teknologi merupakan langkah penting dalam mendorong kemandirian desa di era digital. Melalui peningkatan akses informasi, pengelolaan administrasi yang efisien, dukungan bagi UMKM, dan peningkatan partisipasi masyarakat, TI dapat menjadi pendorong utama dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa. Namun,

untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya yang lebih besar dalam mengatasi tantangan yang ada, seperti infrastruktur dan literasi digital. Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta, desa-desa dapat memanfaatkan TI secara maksimal untuk menciptakan kemandirian yang berkelanjutan.

Penerapan teknologi informasi (TI) terbukti efektif dalam meningkatkan kemandirian desa, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun pemerintahan. Dengan memanfaatkan TI, desa dapat memperluas akses informasi, mempercepat layanan publik, dan mendukung keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Teknologi seperti sistem informasi desa, platform e-commerce lokal, serta aplikasi pelaporan masyarakat telah membuka peluang baru untuk pengembangan ekonomi lokal, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mempermudah komunikasi antara pemerintah desa dan warganya. Namun efektivitas penerapan TI ini tetap dipengaruhi oleh faktor kesiapan infrastruktur, literasi masyarakat digital, serta dukungan dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, untuk mencapai kemandirian desa yang berkelanjutan di era digital, diperlukan strategi pengembangan TI yang inklusif dan berkelanjutan, yang mencakup pelatihan literasi digital, pengembangan infrastruktur teknologi, dan regulasi yang mendukung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R., Malik, I., Nurtamami, I., & Solehudin, M. A. (2023). Mendukung kemajuan desa: Pelatihan komputer untuk kader PKK Desa Mukapayung dalam era digital. *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 3(8), 209-224.
- Ardiansyah, F., Firdaus, N. Y., & Muhtadi, R. (2021). Optimalisasi BUMDES berbasis OVOP (One Village One Product) concept di Kabupaten Pamekasan. *Implementasi Manajemen & Kewirausahaan*, 1(2), 153-164.
- Asbara, N. W., Nurrachma, N., Hidayat, M., Nurhaeda, Z., Izzanuridin, N., Viana, A., & Al Ailmunur, R. (2023). Strategi pengembangan BUMDesa yang berdaya saing di era digitalisasi melalui pemanfaatan teknologi informasi. *Madani: Indonesian Journal of Civil Society*, 5(2), 121-130.
- Badri, M. (2016). Pembangunan pedesaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (studi pada gerakan desa membangun). *Jurnal Dakwah Risalah*, 27(2), 62-73.
- Fadhillah, P., & Yuniarti, A. (2023). Pemberdayaan UMKM: Melihat peluang bisnis UMKM di era digital di Desa Ujunge Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 2(1), 291-298.
- Lutfia, A. (2024). Implementasi pemberdayaan ekonomi pesantren dalam menciptakan kemandirian pesantren di era ekonomi digital perspektif ekonomi Islam (Studi pada Yayasan Pondok Pesantren Al-Hidayat Gerning Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

- Mane, A. A., Syarifuddin, S., Loli, H., Menne, F., Pannyiwi, R., Hasan, S., & Karim, A. (2022). Peran UMKM dalam peningkatan pendapatan masyarakat di Desa Kaloling. *YUME: Journal of Management*, 5(3), 341-346.
- Mukhsin, M. (2020). Peranan teknologi informasi dan komunikasi menerapkan sistem informasi desa dalam publikasi informasi desa di era globalisasi. *Teknokom*, 3(1), 7-15.
- Nugraha, G. S., Dwiyanaputra, R., Bimantoro, F., & Aranta, A. (2024). Sosialisasi pemasaran digital bagi petani dan UMKM di Desa Mujur, Lombok Tengah, NTB. *Jurnal Begawe Teknologi Informasi (JBegaTI)*, 5(1), 57-64.
- Rosari, R., Cakranegara, P. A., Pratiwi, R., Kamal, I., & Sari, C. I. (2022). Strategi manajemen sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan BUMDES di era digitalisasi. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 3040-3049.
- Sanapiah, A. A., & Nugroho, S. (2019). Implementasi Indeks Desa Membangun dalam mendorong perkembangan dan kemandirian desa di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI. *Journal of Public Policy and Applied Administration*, 1(1).
- Suhaeli, E., Nasution, N. A., Januarika, J., Setyaningsih, R., & Rudi, R. (2024). Strategi digitalisasi untuk kemandirian UMKM dan pemberdayaan wanita: Pengabdian masyarakat di Kecamatan Kebon Pedas, Sukabumi. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 2(3), 323-329.
- Sulasno, S., Dwisvimiari, I., & Karlina, L. (2023). Kekayaan intelektual dan pemanfaatan produk usaha mikro kecil menengah golok untuk meningkatkan kesejahteraan di Desa Tejamari Kecamatan Baros. *BANTENESE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 470-478.
- Sulistyowati, F. (2020). Sistem informasi desa dalam mendorong pemberdayaan masyarakat di masa pandemi Covid-19. *Komunikasi, media dan pemberdayaan masyarakat*.
- Suprianto, B. (2023). Literature review: Penerapan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(2), 123-128.
- Wali, W. J. F. S., Rukmana, D. I., & Ningsih, N. (2023). Pendampingan untuk meningkatkan potensi karang taruna Desa Binor dalam peluang bisnis di era teknologi informasi. *Nusantara Journal of Community Engagement and Empowerment*, 1(2), 52-58.